



Evaluasi Faktor-Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Herlina Sambe¹, Mika Mallisa², Amir Jaya³

^{1,2,3}) Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 25-02-2025 | Review 01-03-2025 | Revision 08-03-2025 | Accepted 14-03-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 2) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 3) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Metode penelitian menggunakan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda setelah memenuhi asumsi uji asumsi klasik yaitu uji Normalitas, uji Heteroskedastis, uji Multikolinearitas, dan uji Autokorelasi. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung kepada pegawai bagian keuangan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat sebanyak 40 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SPIP dan SIKD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan Pemanfaatan TI (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Namun secara simultan semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Kata kunci: SPIP; SIKD, Pemanfaatan TI, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract: *This research aims 1) To analyze the influence of the Government's Internal Control System on the quality of the Regional Government Financial Reports of Teluk Bintuni Regency. 2) To analyze the influence of the Regional Financial Information System on the quality of the Regional Government Financial Report of Teluk Bintuni Regency. 3) To analyze the impact of the utilization of Information Technology on the quality of the Regional Government Financial Reports of Teluk Bintuni Regency. The research method uses The data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis after meeting the classical assumption tests, namely the Normality test, Heteroscedasticity test, Multicollinearity test, and Autocorrelation test. The data used is primary data collected through questionnaires distributed directly to 40 employees in the finance department at the Regional Government Office of Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. The results of this study indicate that the SPIP and SIKD variables partially have a positive and significant effect on the quality of regional financial reports, while the Utilization of IT (X3) has a positive but not significant effect on the quality of Regional Financial Reports (Y). However, simultaneously, all variables have a positive and significant effect on the quality of the Regional Financial Report of the Regional Government Office of Teluk Bintuni Regency, West Papua Province.*

Keywords: *SPIP; SIKD, Utilization of IT, Quality of Regional Government Financial Reports.*

¹E-mail: Sambeherlina11@gmail.com

¹E-mail: mika_malissa@ukipaulus.ac.id

¹E-mail: amirjaya0505@gmail.com

Pendahuluan

Sektor publik di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, ditandai dengan adanya tuntutan publik akan akuntabilitas pada instansi pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan atas aktivitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Paembonan et al., 2024; Sanggalangi et al., 2025). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan harus memenuhi prinsip-prinsip SAP yang merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 ini menggantikan (PP) Nomor 24 Tahun 2005 (Firdaus, dkk, 2015).

Proses akuntansi atau tata kelola keuangan telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Pada institusi pemerintahan saat ini, harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi pemerintahan (Setiawati et al., 2025). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan para pemakai informasi (Mangallo et al., 2025). Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Mahaputra & Putra, 2014).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) (Simanjuntak et al., 2024). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Mengacu dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang dan modal yang telah terjadi dalam instansi pemerintah atas dana publik yang telah digunakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah telah berjalan dengan baik (Dori et al., 2025). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan Keuangan Pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. LKPD mendapat penilaian berupa opini dari BPK setiap tahun yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintuni mendapat penilaian dari BPK adalah opini WTP sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Tahun 2023 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun hampir setiap tahun mendapat opini BPK WTP dan WDP, penerapan SPIP masih lemah dengan maturitas yang rendah. Masih ada ketidakpatuhan dari OPD dalam pengelolaan keuangan. Temuan BPK mengenai lemahnya Pengendalian Intern Kabupaten Teluk Bintuni antara lain: pada tahun 2020 belum tertibnya Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Pengelolaan Belanja Bansos dan Belanja hibah pengendalian asset, serta pembayaran atau penjualan kendaraan dinas juga belum tertib. Tahun 2022 pengendalian data pegawai dan pertanggungjawaban Belanja perjalanan dinas pada 4 SKPD belum sesuai ketentuan, serta Penyusunan APBD tahun 2023 juga belum memadai.

Sistem informasi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada serta teknologi informasi yang memadai (Armel, 2017).

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah juga sangat dipengaruhi oleh seberapa andal Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diterapkan. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal Pemerintah Daerah (Evichayani, 2017). SIKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini menfokuskan peranan/pemanfaatan SIKD terhadap organisasi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bagaimana SIKD tersebut berhasil atau tidak untuk diterapkan dalam pelaksanaannya.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah diterapkan. Adapun SIKD yang sekarang diterapkan adalah SIKD NG (*Next Generation*). Salah satu fungsi dari SIKD adalah untuk melihat alokasi transfer dana dari Pusat beserta realisasinya. Pada tahun 2022, Transfer pusat sebesar Rp.2.009.968.888.585, dengan realisasi sebesar Rp Rp.1.949.706.913.060, persentasi 97%. Sedangkan pada tahun 2023 Transfer pusat sebesar Rp 2.566.614.998.000, realisasinya sebesar Rp 1.959.504.982.128 dengan persentasi 76,35%.

Dalam hal ini SIKD sangat membantu dan mempermudah dalam penyiapan data untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah serta memastikan laporan keuangan tersedia dengan cepat, akurat dan sesuai regulasi yang berlaku.

Saat ini semakin berkembangnya Teknologi Informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat, tepat dan akurat. Penelitian Suryani (2022) menyatakan pegawai pemerintahan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan tugasnya untuk memudahkan dan mempercepat pemrosesan transaksi dan meningkatkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dengan akurat. Teknologi informasi yang semakin maju memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, kehandalan, dan kemampuan menyimpan data yang besar.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah menggunakan teknologi Informasi dalam menjalankan aktivitas terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan. Penggunaan teknologi informasi ini dapat meminimalkan kesalahan pegawai dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan. Dengan penggunaan teknologi Informasi, data keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah kabupaten Teluk Bintuni menjadi lebih mudah diakses, sehingga laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang jaringan di Kabupaten Teluk Bintuni kurang stabil sehingga sedikit menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 2) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 3) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

METODE

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: Variabel bebas (*Independent variable*), merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependent* atau terikat. Variabel *Independent* dalam penelitian ini adalah Sistem pengendalian Internal (X1), Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2), dan Pemanfaatan Teknologi (X3). Variabel terikat (*dependent variable*), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel *dependent* atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat (Y).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2020). Indikator SPIP adalah Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Indikator: keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu akses, ketelitian, relevansi/kesesuaian.

Pemanfaatan Teknologi mengacu pada tingkat dimana pegawai menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi yang terstruktur dalam pembuatan laporan keuangan. Indikatornya adalah pengelola keuangan akuntansi telah menggunakan komputer dan penggunaan jaringan. Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah

hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Yuliani, 2016). Indikator kinerja: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengukuran variabel untuk memperoleh data pada Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni adalah dengan menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk memperoleh responden tentang yang mereka alami dan ketahuinya. Adapun skala yang digunakan peneliti dalam instrumen ini adalah skala likert. Skala likert adalah nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala likert secara umum menggunakan peringkat lima angka penilaian yaitu: Sangat setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), Sangat Tidak Setuju (1).

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Provinsi Papua Barat. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 orang.

Metode Pengumpulan Data

Responden diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan petunjuk tertulis, mengisi langsung ditempat penelitian dan setelah selesai mengisi daftar kuisioner, langsung diserahkan kepada peneliti. Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa kuisioner atau daftar pertanyaan adalah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban- jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Pada penelitian ini peneliti langsung membagi kuisioner kepada responden untuk diisi.

Metode Analisis

Data dianalisis dengan menggunakan Metode Regresi Linier berganda dan telah memenuhi uji kualitas data serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji multikolerianitas, uji heteroskedastis dan uji autokorelasi. Uji regresi linier berganda yaitu suatu uji yang digunakan penelitian dengan maksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi atau bisa disebut juga suatu uji dimana untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat Ghozali (2018). Persamaan linier berganda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X1 : SPIP

X2 : SIKD

X3 : Pemanfaatan TI

e : *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar sebanyak 40, kuisisioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 40 eksemplar sehingga *response rate* sebesar 100%. Sebanyak 40 kuesioner dapat digunakan untuk diolah karena memenuhi kriteria, dan semua jawaban dapat dijawab baik oleh responden. Penentuan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa responden adalah pegawai bagian keuangan yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas & Reliabilitas

Berdasarkan tabel hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator kuesioner dinyatakan valid. Karena nilai r hitung $>$ r tabel. Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,2638, maka seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak dijadikan instrumen dalam penelitian ini. Selain itu, nilai signifikansi adalah 0.000. Sedangkan Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Conbrach's Alpha $>$ 0,60, Dimana $0,858 >$ 0,60. Sehingga seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak untuk dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada table 1

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	13,926	3,305		4,213	,000
SPIP	,169	,145	,254	2,168	,025
SIKD	,181	,105	,467	2,721	,014
Pemanfaatan TI	,170	,176	,149	1,963	,342

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, dapat disimpulkan persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 13,926 + 0,169 X_1 + 0,181 X_2 + 0,170 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 13,926 berarti jika variabel SPIP, SIKD, dan Pemanfaatan TI bernilai 0, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 13,926.
- b. Koefisien regresi untuk variabel SPIP, bernilai positif 0,169 artinya semakin baik SPIP institusi maka akan semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- c. Koefisien regresi untuk variabel SIKD, bernilai positif 0,181, artinya semakin baik SIKD diterapkan oleh institusi maka akan semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- d. Koefisien regresi untuk variabel Pemanfaatan TI bernilai positif 0,170, artinya semakin baik Pemanfaatan TI oleh pegawai maka akan semakin meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Uji Hipotesis (Uji t)

1. Pengaruh SPIP terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai t hitung variabel SPIP memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,168 > 2,021$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi yaitu 0,05. Selain itu, dengan melihat nilai t hitung lebih besar dari t table maka hipotesis yang menyatakan variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti jika penerapan SPIP semakin baik maka kualitas Laporan Keuangan Daerah semakin meningkat pula.

2. Pengaruh SIKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai t hitung SIKD memiliki nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,721 > 2,021$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi yaitu 0,05. Selain itu, dengan melihat nilai t hitung lebih besar dari t table maka hipotesis yang menyatakan variabel SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti jika penerapan SIKD semakin baik maka kualitas Laporan Keuangan Daerah semakin meningkat pula.

3. Pengaruh Pemanfaatan TI terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai variabel motivasi memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $1,963 < 2,021$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,342. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai batas signifikansi yaitu 0,05. Selain itu, nilai t hitung lebih kecil dari t table maka hipotesis yang menyatakan variabel Pemanfaatan TI berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini berarti apabila pegawai memanfaatkan TI atau tidak, maka tidak akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Tabel 2. Uji Anova (F)

ANOVA ^a		Sum of		Mean		Si
Model	Squares	df	Square	F	g.	
Regression	188,130	3	62,710	23,456	0 ^b	,00
Residual	96,245	36	2,673			

Total	284,375	39		
-------	---------	----	--	--

a. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan TI, SPIP, SIKD

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 23.456. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai $F_{hitung} = 23.456 >$ dari $F_{tabel} = 2,840$. Ini berarti bahwa variable independen yang terdiri dari SPIP, SIKD, dan Pemanfaatan TI secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,813 ^a	,662	,633	1,635	2,239

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan TI, SPIP, SIKD

b. Dependent Variable: Kualitas Lap Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi pada tabel 3 diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,662 atau 66,2%. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yaitu SPIP, SIKD dan Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 66,2 % sedangkan sisanya 33,8%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 40 responden, maka dapat diketahui bagaimana tanggapan para responden terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam kuesioner. Tanggapan responden dapat dijelaskan dalam pembahasan berikut:

Pengaruh SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,168 dengan signifikansi sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa variabel SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. SPIP yang meningkat atau menurun akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Heinrich, A & Probohudono, A.N. (2023) yang diperoleh hasil SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana.

Pengaruh SIKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,400 dengan signifikansi sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis 2 yang

diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa variabel SIKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. SIKD yang meningkat atau menurun akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Siahaan & Simanjuntak (2020) yang diperoleh hasil bahwa SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Pengaruh Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian hipotesis 3 menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,594 dengan signifikansi sebesar 0,395. Hal ini berarti bahwa pengujian hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan pada variabel pemanfaatan TI terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pemanfaatan TI yang baik atau tidak oleh pimpinan institusi maka tidak akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Armel (2017) yang memperoleh hasil Pemanfaatan TI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Dumai.

Pengaruh SPIP, SIKD, dan Pemanfaatan TI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian Hipotesis 4 menghasilkan nilai F hitung sebesar 23.456 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis 4 yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan dari variabel SPIP, SIKD dan Pemanfaatan TI terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable SPIP (X1) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jika SPIP baik, maka kualitas Laporan Keuangan Daerah akan meningkat pula. Demikian juga sebaliknya. Hasil tersebut mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk

1. Bintuni Provinsi Papua Barat.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable SIKD (X2) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jika SIKD di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, maka kualitas Laporan Keuangan Daerah akan meningkat pula. Demikian juga sebaliknya. Hasil tersebut mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Pemanfaatan TI (X3) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan

hasil Uji t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika pemanfaatan TI meningkat atau menurun, tidak akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa Pemanfaatan TI (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

4. Dari hasil Uji F (Anova) secara simultan variabel SPIP, SIKD, dan pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.

SARAN

Penelitian mendatang dapat menggunakan variable yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena penelitian ini menemukan bahwa masih ada 33% yang dipengaruhi variable lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Armel, R. Y. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1*.
- Dori, H. P., Lambe, K. H. P., & Sabandar, S. Y. (2025). ANALISIS DAMPAK SISTEM PELAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH DI BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA NABIRE. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 27-34. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/853>
- Efendi, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vo. 3, No. 2, ISSN: 2502-6976*.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal EKonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.3 ISSN: 2337-3067*, 403-428.
- Firdaus, Nadirsyah, & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peneraan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal MAGister Akuntansi ISSN: 2302-0164*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Penelola Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Heinrich, A & Probohudono, A.N. 2023. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstelasi, Vol. 3 (2)*.

- Mahaputra, I. P., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 ISSN: 2302-8556, 230-244.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108-115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mardiasmo. (2020). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1-6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Putra, B. D., & Amar, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3, No. 1, ISSN: 2337- 5354.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86-92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141-155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Siahaan, S.B. dan Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Jurnal Manajemen*, Vol. 6 (2).
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 20, No. 2, 179-191.
- Simanjuntak, R. T. ., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2024). EFISIENSI PENGANGGARAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA DI BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT PROVINSI PROVINSI PAPUA TENGAH. *MARIOBRE: Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 76-82. <https://doi.org/10.1284/mariobre.v2i2.310>
- Suryani, D. & Haryanto, A (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan*, 15(3), 45-58
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 14, No. 1.
- Wibowo, S. (2022). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Teori dan Praktik*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

